

SEJARAH PERKEMBANGAN KOMODITI KARET RAKYAT DI JAMBI (1997–2010): KRISIS MONETER, TRANSFORMASI, DAN RESPONS PEMERINTAH

Husnul Qotimah, Ali Muzakir

husnulqotimah@gmail.com

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstrak

Studi ini menelusuri dinamika perkembangan karet rakyat di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 1997 hingga 2010, dengan penekanan pada tiga aspek kritis: (1) dampak krisis moneter 1997-1998, (2) transformasi pasca-Reformasi, dan (3) respons stakeholders terhadap intervensi pemerintah. Dengan mengadopsi metode penelitian sejarah melalui pendekatan kualitatif - meliputi tahapan heuristik, verifikasi sumber, interpretasi kritis, dan rekonstruksi historiografis. Penelitian ini mengungkap beberapa temuan kunci. Di tengah gejolak krisis moneter, perkebunan karet terbukti menjadi penyangga ekonomi regional dengan peningkatan produksi dari 229.781 ton (1997) menjadi 232.345 ton (1998), meski diiringi penurunan kualitas akibat keterbatasan perawatan. Era pasca-Orde Baru diwarnai fenomena konversi lahan ke kelapa sawit, namun inisiatif peremajaan tahun 2006-2010 berhasil merevitalisasi komoditas karet.

Kata Kunci: Ekonomi perkebunan, krisis finansial Asia, revitalisasi pertanian, sejarah agraria, pembangunan pedesaan

Pendahuluan

Sebagai negara dengan wilayah yang luas, Indonesia dikaruniai beragam sumber daya alam melimpah, baik migas (seperti minyak dan batu bara) maupun non-migas (emas, kelapa sawit, lada, kopi, karet, dan lainnya). Kekayaan alam ini menjadi pondasi penting dalam pembangunan ekonomi, yang umumnya berfokus pada pengembangan sektor industri. Namun, pembangunan tersebut masih terkendala oleh belum optimalnya perangkat hukum untuk mendukung kemajuan masyarakat. Dalam konteks ini, sektor pertanian—termasuk perkebunan karet—menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional karena kontribusinya yang konsisten. (Rini Dwiastuti, 2005)

Secara historis, karet telah memainkan peran strategis sejak era kolonial Hindia Belanda, ketika komoditas ini menjadi primadona ekspor untuk mendukung industrialisasi global. Saat ini, pengelolaan karet melibatkan pemerintah dan perusahaan sebagai regulator serta distributor utama. (Anne Booth dan William .J. O'Malley, 1988)

Perkebunan karet memiliki peran ganda yang strategis, tidak hanya sebagai penyumbang devisa negara tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Kontribusi nyata sektor ini terlihat dari kemampuannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja perkebunan.

Akar historis keberadaan perkebunan di Indonesia dapat ditelusuri sejak kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16 yang termotivasi oleh kekayaan rempah-rempah Nusantara. Komoditas bernilai tinggi seperti cengkeh dan pala tidak hanya memiliki nilai ekonomis sebagai komoditas perdagangan global, tetapi juga nilai strategis dalam bidang pengobatan dan pangan. Daya tarik inilah yang kemudian menjadi pemicu awal kolonisasi sekaligus pondasi sistem perkebunan modern di Hindia Belanda. Pada perkembangan selanjutnya, terutama sejak akhir abad ke-19, pemerintah kolonial secara sistematis membangun struktur agribisnis yang berorientasi ekspor. Tiga komoditas andalan - tembakau, kopi, dan karet - muncul sebagai primadona yang mendominasi perdagangan internasional. Pola pengembangan perkebunan kolonial ini meninggalkan warisan sistemik dimana sektor pertanian hingga kini tetap menjadi pilar fundamental pembangunan nasional. (Puspita, 2015)

Eksistensi sektor pertanian modern mempertahankan relevansinya melalui beberapa kontribusi kunci. Selain menjamin ketahanan pangan melalui penyediaan bahan pokok, sektor ini juga berfungsi sebagai buffer ketenagakerjaan dengan kemampuan menyerap angkatan kerja dalam skala masif. Dari perspektif makroekonomi, sumbangsihnya terhadap neraca perdagangan melalui devisa ekspor sekaligus mengurangi tekanan defisit neraca pembayaran. Karakteristik unik sektor pertanian yang memiliki efek pengganda ekonomi tinggi dengan ketergantungan impor yang relatif rendah semakin memperkuat posisinya sebagai penyangga ketahanan ekonomi nasional.

Komoditas karet telah menjadi bagian penting dari lanskap pertanian Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan, jauh sebelum meletusnya Perang Dunia II. Periode keemasan perkebunan karet terjadi antara tahun 1926 hingga 1945, di mana industri ini mampu bertahan meskipun terkena dampak depresi ekonomi global tahun 1930-an. Posisi Indonesia sebagai produsen karet alam terkemuka di dunia semakin menguat pada awal 1950-an, membuktikan ketahanan sektor perkebunan nasional pasca-kemerdekaan. Pertumbuhan ekonomi di sektor perkebunan karet, khususnya di wilayah Jambi, dipengaruhi oleh empat faktor kunci: ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, kekayaan sumber daya alam, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sinergi antara faktor-faktor ini tidak hanya meningkatkan volume produksi tetapi juga mendorong perbaikan kualitas pengolahan karet. (Abdurahman dan Ita Syamtasyah, 2016)

Dari perspektif geografis, Provinsi Jambi memiliki karakteristik topografi yang ideal untuk budidaya karet dengan tiga tipe wilayah utama: rawa-rawa, dataran rendah kering, dan daerah pegunungan. Kondisi agroekologis yang optimal ditemukan di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut dan kisaran suhu 25-35°C,

menjadikan Jambi sebagai salah satu sentra produksi karet terpenting di Indonesia. Sebagai salah satu komoditas andalan sejak abad ke-19, karet telah menjadi tulang punggung ekonomi Jambi bersama dengan lada, teh, dan kopi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa meskipun pembudidayaan karet secara sistematis baru dimulai oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1904, praktik penanaman karet oleh masyarakat lokal sebenarnya telah ada sebelumnya. Penyebaran awal benih karet ke Jambi terjadi melalui jaringan perdagangan dan keagamaan, dimana biji karet dibawa oleh jamaah haji asal Sumatera yang pulang melalui Singapura. (Junaidi, dkk, 2013)

Pengenalan tanaman karet secara formal ke wilayah Jambi terjadi pada masa pemerintahan Residen pertama O.L. Helfrich (1906-1908). Langkah awal pengembangan komoditas ini dilakukan melalui pendirian kebun percobaan di Tembesi dan Bangko sebagai bagian dari kebijakan agrikultur kolonial. Kebun percobaan ini berfungsi sebagai pusat distribusi bibit unggul secara cuma-cuma kepada penduduk lokal, dengan tujuan strategis meningkatkan basis penerimaan pajak pemerintah kolonial. Dalam pelaksanaannya, kebun percobaan tersebut mengembangkan dua varietas karet utama, yaitu *Ficus elastica* dan *Plaquium*, sebagai tanaman inti. Selain itu, dilakukan juga diversifikasi tanaman pendukung seperti pala (*Myristica fragrans*), cengkeh (*Syzygium aromaticum*), serta berbagai jenis buah-buahan tropis meliputi mangga (*Mangifera indica*), sirsak (*Annona muricata*), belimbing (*Averrhoa carambola*), dan kayu tembesi (*Fagraea fragrans*). Kebijakan ini mencerminkan pendekatan multifungsi dalam pengembangan agrikultur kolonial yang tidak hanya berfokus pada komoditas ekspor, tetapi juga tanaman pendukung kehidupan masyarakat. (Junaidi. dkk, 2013)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode sejarah untuk merekonstruksi perkembangan komoditas karet rakyat di Jambi dalam kurun waktu 1997 hingga 2010. Sebagai sebuah penelitian historis, kajian ini mengikuti empat tahapan metodologis yang saling berkaitan: heuristik (pengumpulan data), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah) (Kuntowijoyo, 1994).

Tahap heuristik dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis. Istilah heuristik yang berasal dari bahasa Yunani 'heuristiken' (menemukan) ini diwujudkan dalam pengumpulan dua jenis data utama. Data primer diperoleh dari dokumen otentik seperti arsip Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, tesis akademik (misalnya karya Lindayanti tentang perkebunan karet era kolonial), serta dokumen kontemporer yang secara langsung membahas periode penelitian. Sementara data sekunder bersumber dari literatur pendukung seperti karya Elsbeth Locher-Scholten dan Sartono Kartodirjo yang memberikan konteks historis lebih luas.

Proses verifikasi sumber dilakukan melalui kritik internal dan eksternal untuk memastikan keabsahan materi penelitian. Kritik internal difokuskan pada evaluasi substansi dan keandalan isi dokumen, sedangkan kritik eksternal meneliti keaslian fisik sumber. Tahap ini penting untuk menyaring data yang akan digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Interpretasi data dilakukan dengan pendekatan analisis dan sintesis. Analisis digunakan untuk menguraikan berbagai temuan data, sementara sintesis berperan dalam menyatukan elemen-elemen penelitian menjadi pemahaman yang koheren. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam membangun narasi sejarah yang komprehensif.

Tahap akhir berupa historiografi melibatkan penyusunan seluruh temuan penelitian menjadi karya akademik utuh (Irwanto, 2004). Penulisan mengikuti kaidah ilmiah dengan memperhatikan konsistensi terminologi, tata bahasa, dan sistem referensi. Hasil akhirnya adalah rekonstruksi sejarah yang memadukan aspek ekonomi dan sosial perkebunan karet rakyat Jambi, termasuk dinamika pemasarannya selama periode transisi pasca-Orde Baru hingga awal reformasi.

Hasil dan Pembahasan

Perkebunan Karet Rakyat Provinsi Jambi Pada Akhir Masa Orde Baru 1997-1998

Pada periode akhir pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami guncangan ekonomi terberat yang kemudian menjadi salah satu faktor utama keruntuhan rezim Orde Baru. Krisis moneter yang melanda pada tahun 1997 bermula dari ambruknya nilai tukar Baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat di pertengahan tahun tersebut. Awalnya, otoritas ekonomi Indonesia percaya bahwa fundamental ekonomi yang kuat akan melindungi negara dari badai krisis keuangan. Namun keyakinan ini ternyata keliru ketika gelombang spekulasi mulai menyasar mata uang rupiah. Tekanan spekulatif yang terus-menerus terhadap rupiah, ditambah dengan cadangan devisa yang semakin menipis, memaksa pemerintah mengambil langkah darurat dengan memperlebar batas intervensi nilai tukar pada Juli 1997. Kebijakan ini justru menjadi awal dari rentetan krisis yang semakin dalam, menunjukkan kerentanan sistem ekonomi Orde Baru yang selama ini dianggap stabil. Krisis moneter ini tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga menjadi pemicu krisis multidimensi yang menggerus legitimasi pemerintahan Soeharto. (Indraini, 2021)

Tahun 1997 menjadi ujian berat bagi ketahanan sektor perkebunan di Jambi ketika krisis moneter melanda Indonesia. Padahal, harga karet di pasar internasional sudah menunjukkan tren penurunan sejak 1996. Krisis moneter semakin memperparah kondisi ini, menyebabkan harga jual karet anjlok dari US\$100 per ton pada awal krisis menjadi hanya US\$60 per ton di tahun 1998, terutama akibat depresiasi nilai tukar rupiah yang signifikan. Ironisnya, meskipun volume ekspor karet alam Indonesia meningkat dari 1.404.010 ton (1997) menjadi 1.641.186 ton (1998), nilai ekspornya justru merosot tajam karena harga internasional yang jatuh dari US\$1.063,679 menjadi US\$671,132 per ton. Dalam situasi ini, Amerika Serikat tetap menjadi tujuan utama ekspor karet Jambi dengan permintaan yang relatif stabil dibanding negara lain. (BPS, 2017)

Di tengah krisis multidimensi, sektor pertanian (termasuk perkebunan, kehutanan, dan perikanan) justru menunjukkan ketangguhannya. Data menunjukkan bahwa sektor ini tetap tumbuh 0-1% selama krisis, sementara sektor lain mengalami kontraksi. Kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja juga meningkat dari 40,7% menjadi 45,0%, membuktikan

perannya sebagai penyangga ekonomi nasional di masa sulit. Ketahanan sektor pertanian ini terutama didorong oleh sifatnya yang kurang terpapar fluktuasi pasar keuangan dibandingkan sektor industri dan jasa. (William D. Sunderlin dkk., 2000)

Di tengah gejolak krisis moneter 1997-1998, produksi karet rakyat di Jambi justru menunjukkan peningkatan dari 229.781 ton (1997) menjadi 232.345 ton (1998). Namun peningkatan produksi ini diiringi oleh penurunan harga komoditas, dimana harga SIR 20 anjlok dari US\$419 menjadi hanya US\$287 per ton dalam periode yang sama. Beberapa kabupaten seperti Tebo mengalami pertumbuhan produksi signifikan, dari 83.086 ton (1997) menjadi 85.765 ton (1998). Paradoks peningkatan produksi di tengah krisis ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor ekonomi makro. Tingginya suku bunga dan komponen impor dalam proses produksi mendorong kenaikan biaya produksi yang berujung pada inflasi harga barang. Depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang mencapai tingkat dramatis justru menciptakan insentif bagi peningkatan ekspor, karena daya saing harga produk Indonesia di pasar internasional menjadi lebih baik. Mekanisme inilah yang menjelaskan mengapa volume ekspor karet Jambi tetap tumbuh meskipun terjadi krisis ekonomi yang parah di dalam negeri.

Dampak krisis terlihat dalam dua paradoks sekaligus. Secara nominal dalam rupiah, terjadi kenaikan biaya perdagangan dan harga bahan olah karet (bokar) di tingkat petani. Namun dalam nilai dolar AS, harga SIR 20 justru merosot dari 95 sen/kg (Juli 1997) menjadi 74 sen/kg (Maret 1998). Penelitian Cicilia Nancy, dkk (1998) mengungkapkan bahwa penurunan ini dipicu oleh ketidakstabilan nilai tukar di negara-negara produsen utama (Thailand, Indonesia, dan Malaysia), yang membuat pembeli internasional bersikap lebih hati-hati dengan menekan harga.

Kondisi ini memaksa petani karet meningkatkan intensitas penyadapan untuk memperoleh lebih banyak lateks guna mengimbangi melonjaknya harga kebutuhan pokok. Ironisnya, Indonesia harus menghadapi bencana iklim bersamaan dengan krisis ekonomi. Fenomena El Niño tahun 1997-1998 menyebabkan kekeringan panjang yang mengurangi produksi pangan dan perkebunan, diperparah dengan maraknya kebakaran hutan. Menurut Boediono, situasi ini mengakibatkan: (1) penurunan produksi komoditas, (2) gangguan sistem pembayaran, (3) kesulitan impor akibat langkanya devisa, dan (4) Letter of Credit (LC) perbankan yang tidak likuid. Kombinasi krisis moneter dan bencana alam ini menciptakan tekanan multidimensi bagi sektor perkebunan karet di Jambi. (Boediono, 2016)

Penurunan harga karet memberikan dampak signifikan bagi kehidupan petani di Jambi, mengingat provinsi ini merupakan salah satu sentra produksi karet terpenting di Indonesia dimana banyak masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada komoditas ini. Tiga kabupaten utama penghasil karet rakyat adalah Sarolangun Bangko (225.060 ha), Bungo Tebo (150.922 ha), dan Batanghari (128.487 ha) berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 1997.

Dampak krisis moneter terasa paling berat di Kabupaten Bungo Tebo yang memiliki jumlah petani karet terbanyak, mencapai 80.453 jiwa. Penurunan drastis harga ekspor SIR 20 dari 95 sen dolar AS (1997) menjadi 74 sen dolar AS (Maret 1998) memaksa banyak petani beralih ke komoditas lain. Fluktuasi nilai tukar mata uang di negara-negara produsen utama (Thailand, Indonesia, dan Malaysia) menyebabkan pembeli internasional bersikap lebih konservatif dengan menekan harga pembelian.

Tabel 3: Luas Areal Perkebunan Karet Rakyat Tahun 1997

Kabupaten	Luas Areal (ha)
Sarolangun Bangko	225,060
Bungo Tebo	150,922
Batanghari	128,487

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Statistik Perkebunan 1997

Kondisi ini semakin mempersulit sekitar 80.000 penduduk Jambi yang menggantungkan hidupnya pada perkebunan karet, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga di tengah krisis ekonomi yang melanda.

Kondisi Perkebunan Karet Rakyat Selepas Masa Orde Baru

Pasca-lengsernya Presiden Soeharto, dampak krisis moneter 1997-1998 masih terus dirasakan melalui penurunan ekonomi dan melambungnya harga kebutuhan pokok. Provinsi Jambi sebagai salah satu sentra perkebunan utama mengalami perubahan struktural yang signifikan, khususnya pada sektor karet rakyat. Periode 2000-2005 mencatat penyusutan luas areal perkebunan karet yang cukup drastis, disertai penurunan jumlah petani secara signifikan.

Fenomena ini terutama disebabkan oleh migrasi massal petani ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan, yaitu sawit. Banyak petani karet memilih beralih ke tanaman perkebunan sawit dengan nilai jual lebih tinggi dan prospek pasar yang lebih stabil. Pergeseran ini merefleksikan adaptasi masyarakat terhadap realitas ekonomi pasca-krisis, sekaligus menunjukkan kerentanan sektor karet rakyat terhadap fluktuasi pasar global.

Perubahan pola tanam ini tidak hanya berdampak pada struktur agraria di Jambi, tetapi juga mengubah lanskap sosial-ekonomi masyarakat pedesaan yang selama puluhan tahun bergantung pada karet sebagai tulang punggung perekonomian

Luas areal di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin pada tahun 2006.

Kabupaten	Areal
Batanghari	109,551
Muaro Jambi	62,136
Bungo	88,664
Tebo	108,440
Sarolangun	117,717
Merangin	117,509

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, *Statistik Perkebunan tahun 2006*, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Jambi

Periode 1997-2005 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stagnan pada komoditas karet di Jambi, terutama jika dibandingkan dengan perkembangan pesat yang dialami oleh kelapa sawit. Meskipun demikian, melalui berbagai program peremajaan, pemerintah berhasil mempertahankan eksistensi perkebunan karet sebagai salah satu penyumbang devisa utama provinsi ini.

Data menunjukkan bahwa secara kuantitas, perkebunan karet tetap mendominasi dengan jumlah petani yang terus meningkat dari 212.257 pada tahun 2000 menjadi 246.774 di tahun 2010. Sementara itu, jumlah petani sawit memang menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dari 106.564 menjadi 185.025 dalam periode yang sama (Tabel 1). Fenomena ini mengindikasikan adanya dualisme dalam perkembangan perkebunan di Jambi: di satu sisi terjadi alih komoditas ke sawit, namun di sisi lain loyalitas petani karet tetap terjaga.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Petani Karet dan Sawit di Jambi (2000-2010)

Tahun	Petani Karet	Petani Sawit
2000	212,257	106,564
2001	212,280	108,676
...
2010	246,774	185,025

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi (2010)

Ketidakstabilan harga karet memang mendorong sebagian petani beralih ke sawit, namun terdapat kelompok petani yang tetap bertahan dengan berbagai pertimbangan. Faktor utama yang mendorong ketahanan petani karet antara lain:

1. Program pemerintah dalam peningkatan mutu bahan olah karet (bokar)
2. Pembinaan dan pendampingan teknis yang intensif
3. Keberlanjutan pasar ekspor yang terjamin
4. Adaptasi petani terhadap fluktuasi harga melalui diversifikasi pendapatan

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi persaingan ketat dengan sawit, komoditas karet tetap memiliki daya tahan dan prospek pengembangan di Provinsi Jambi, terutama melalui pendekatan intensifikasi dan peningkatan nilai tambah produk.

Respon Petani Karet Terhadap Bantuan dari Pemerintah Tahun 2000-2010

Pasca krisis ekonomi 1997-1998, program bantuan pemerintah untuk petani karet di Jambi menghadapi tantangan kompleks. Banyak petani yang mulai beralih ke komoditas lain seperti sawit yang dianggap lebih mudah dalam perawatan dan lebih menguntungkan secara ekonomis. Menyikapi tren ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan pengembangan kedua komoditas unggulan tersebut melalui berbagai kebijakan strategis, dengan tujuan mempertahankan posisi karet sebagai salah satu penopang ekonomi daerah. Program peremajaan karet yang diluncurkan pemerintah mendapatkan respons beragam dari petani. Data Balitbangda (2009) menunjukkan bahwa mayoritas petani menyambut positif inisiatif ini. Pada 2006: 30% menyatakan "sangat senang" dan 70% "senang". Pada 2007: 41,33% "sangat senang", 56% "senang", dengan sedikit yang kurang merespons (1,33%). Pada 2008: 37,65% "sangat senang" dan 50,59% "senang", meskipun ada peningkatan yang menyatakan "kurang senang" (3,36%)

Program peremajaan karet rakyat di Jambi menerapkan sejumlah persyaratan ketat untuk memastikan efektivitas dan keadilan distribusi bantuan. Petani diwajibkan bergabung dalam kelompok tani beranggotakan 25-30 orang dengan struktur kepengurusan yang jelas. Mereka juga harus memiliki lahan karet yang memenuhi kriteria: (1) aksesibilitas tinggi (dekat permukiman atau jalur transportasi), (2) status kepemilikan jelas, (3) minimal 1 hektar per keluarga dengan total pengembangan 10 hektar per kelompok, serta (4) berada di luar kawasan hutan lindung. Calon peserta harus memenuhi syarat administratif seperti domisili di zona pengembangan, usia produktif (20-50 tahun), dan kesiediaan mengikuti prosedur resmi.

Namun implementasi program menghadapi enam tantangan utama menurut Suharyon (2021): *Pertama*, rendahnya literasi teknologi petani menyulitkan adopsi inovasi peremajaan. *Kedua*, kapasitas kelompok tani sebagai mediator sering tidak optimal dalam koordinasi antara pemerintah dan petani. *Ketiga*, keterbatasan modal menjadi penghambat utama karena biaya peremajaan mencapai Rp15-20 juta per hektar - suatu nilai yang sulit terjangkau tanpa skim kredit khusus. *Keempat*, meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program sejak 2006, dinamika alih komoditas ke sawit tetap terjadi akibat disparitas profitabilitas. Data menunjukkan produktivitas sawit (3-4 ton/ha/tahun) memberikan pendapatan kotor Rp30-40 juta/tahun, sementara karet hanya Rp15-20 juta/tahun. *Kelima*, pendampingan penyuluh pertanian yang tidak intensif menyebabkan

kesenjangan implementasi di lapangan. *Keenam*, persyaratan perbankan yang membutuhkan sertifikat lahan sebagai jaminan (dimiliki hanya oleh 23% petani menurut data BPS 2020) menjadi bottleneck akses pembiayaan.

Upaya penyelesaiannya memerlukan pendekatan multidimensi: (1) penyederhanaan birokrasi perijinan lahan, (2) penguatan kelembagaan kelompok tani melalui capacity building, serta (3) skema pembiayaan inovatif seperti Kredit Usaha Rakyat dengan jaminan kolektif. Evaluasi program menunjukkan bahwa intervensi yang berfokus pada peningkatan nilai tambah (pengolahan lateks menjadi produk jadi) memiliki efektivitas lebih tinggi dibanding sekadar peremajaan dalam menjaga loyalitas petani.

Kesimpulan

Perkebunan karet rakyat di Provinsi Jambi pada akhir masa Orde Baru (1997–1998) menghadapi tantangan berat akibat krisis moneter dan dampak ikutan seperti depresiasi rupiah, penurunan harga karet internasional, serta fenomena El Niño yang mengganggu produksi. Meskipun volume ekspor meningkat, nilai ekspor merosot tajam, mengurangi pendapatan petani. Krisis ini memaksa petani meningkatkan intensitas penyiapan untuk bertahan hidup, sementara sebagian mulai mempertimbangkan alih komoditas ke sawit yang lebih menguntungkan.

Pasca-Orde Baru (2000–2010), sektor karet rakyat di Jambi mengalami perubahan struktural. Program peremajaan dan bantuan pemerintah mendapat respons positif, tetapi tetap kalah pesat dibandingkan perkembangan sawit. Faktor seperti disparitas pendapatan, biaya produksi tinggi, dan hambatan permodalan mendorong migrasi petani ke sawit. Namun, loyalitas sebagian petani terhadap karet tetap terjaga berkat program peningkatan mutu, pendampingan teknis, dan keberlanjutan pasar ekspor.

Secara keseluruhan, karet tetap menjadi komoditas penting di Jambi meskipun menghadapi persaingan ketat dengan sawit. Keberlanjutan sektor ini bergantung pada kebijakan yang mendorong intensifikasi, diversifikasi produk bernilai tambah, serta penyederhanaan akses pembiayaan dan kepemilikan lahan. Tantangan ke depan adalah menyeimbangkan pengembangan karet dan sawit sambil memastikan kesejahteraan petani dalam menghadapi fluktuasi pasar global.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, Ibnu dan Ita Syamtasiyah. 2016. *Karet Sebagai Primadona Jambi 1920-1953*. Depok: FIB UI Press
- Anne Booth dan William .J. O'Malley. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Anisa Indraini, *Krisis Ekonomi 1998 dan Cerita Kejatuhan Soeharto*, (<https://Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-5125015/Krisis-Ekonomi-1998-Dan-Cerita-Kejatuhan-Soeharto>, Diakses Pada 14 September 2021)

- Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi. 2009. *Pengembangan Perkebunan karet Propinsi jambi Melalui Peremajaan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, Jambi
- Boediono. 2016. *Ekonomi Indonesia Dalam Lintas Sejarah*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Cicilia Nancy Dan Chairil Anwar dan Sinung Hendratno, *Tingkat Kesejahteraan Petani Karet Di Dalam Kondisi Krisis Moneter*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 46(4)
- Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, *Statistik Perkebunan,1997*, Dinas perkebunan Provinsi Jambi, Jambi.
- Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, *Statistik Perkebunan,2006*, Dinas perkebunan Provinsi Jambi, Jambi.
- Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, *Statistik Perkebunan,2010*, Dinas perkebunan Provinsi Jambi, Jambi
- Irwanto, dedi, *Metodologi dan Historiografi Sejarah Cara Cepat Menulis Sejarah*, Yogyakarta: Eja Publisher, 2004
- Junaidi, Lindayanty dan Ujang Hariadi. 2013. *Jambi Dalam Sejarah 1500-1942*. Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya Jambi.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metode Sejarah*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Puspita, Celia Alisa. 2015. *Peranan Perkebunan Karet Jalupang Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Cipeundeuy Kabupaten Subang (1991-2009)*. Bandung: UPI Press.
- Rini Dwiastuti, dkk,. 2008. *Penentuan Sektor Kunci Pembangunan Pertanian Indonesia: Pendekatan Input Output Nasional 2005*, Jurnal AGRISE, 2(1)
- Suharyon. 2021. *Potensi, Kendala dan Solusi Peremajaan Karet Dalam Mewujudkan Pertanian Maju Mandiri-Modern di Tengah Perubahan Iklim dan Pandemic Covid 19 Di Provinsi Jambi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan, 5(1)
- William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarno dan Edy Rianto dan Arild Angelsen. 2000. *Dampak Krisis Ekonomi Indonesia Terhadap Petani Kecil dan Tutupan Hutan Alam di Luar Jawa*. Bogor: Cifor